

**EVALUASI KETERSEDIAAN KOLEKSI BERDASARKAN STUDI  
TERHADAP SILABI KELAS INTERNASIONAL DI PERPUSTAKAAN  
SMAN I YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Adab  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Perpustakaan  
Pada Program Studi Ilmu Perpustakaan



Disusun Oleh:

**Siti Suwaebatul Islamiyah**  
**Nim. 05140029**

**PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN  
JURUSAN ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI  
FAKULTAS ADAB  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2009**

**Anis Masruri, S. Ag. SIP.,M. Si.**  
**Dosen Prodi Ilmu Perpustakaan**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

---

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari Siti Suwaebatul Islamiyah

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Adab  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Suwaebatul Islamiyah  
Nim : 05140029  
Jurusan : Ilmu Perpustakaan dan Informasi (Adab)  
Judul Skripsi : Evaluasi Ketersediaan Koleksi Berdasarkan Studi Terhadap Silabi Kelas Internasional di Perpustakaan SMAN 1 Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Karena itu kami berharap skripsi tersebut dalam waktu dekat dapat disidangkan dalam sidang munaqasyah.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, oktober 2009

Pembimbing,

Anis Masruri, S. Ag. SIP., M.Si  
NIP. 19710907 1998031003



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS ADAB**  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fax. (0274) 513949

### PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DA/PP.00.9/ 102 /2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

EVALUASI KETERSEDIAAN KOLEKSI BERDASARKAN STUDI TERHADAP SILABI KELAS INTERNASIONAL DI PERPUSTAKAAN SMAN 1 YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Siti Suwaebatul Islamiyah  
NIM : 05140029  
Telah dimunaqasyahkan pada : 26 Nopember 2009  
Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga

#### TIM MUNAQASYAH :

Ketua/Sidang

Anis Masruri, S.Ag./SIP., M.Si.  
NIP. 19710907 199803 1 003

Penguji I

M.Solihin Arianto, S.Ag., SS., M.Lis.  
NIP. 19700906 199903 1 012

Penguji II

Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SIP., M.Si.  
NIP. 19680701 199803 2 001

Yogyakarta, 26 Januari 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Adab

DEKAN



Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M.Ag.  
NIP. 19520921 198403 1 001

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا

يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ

وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, “berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Mujadilah:11).

## **PERSEMBAHAN**

*Karya tulis ini kupersembahkan untuk:*

*Seluruh keluarga besar Bapak Margono (ALM) dan*

*Ibu Kartinah yang dengan*

*pengorbanan dan kesabaran telah memberikan penulis*

*kepercayaan, dorongan, semangat,*

*pengertian dan doa restunya untuk menyelesaikan karya tulis ini.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tahap akhir studi di Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan sehingga saran, kritik, dan tanggapan positif dari berbagai pihak masih penulis harapkan untuk menyempurnakan hasil penelitian ini.

Karya tulis ini tentunya tidak akan dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan apabila tanpa adanya bantuan, bimbingan, saran, dan kritik serta bantuan moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., MA. selaku Dekan Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Tafrikhuddin, S.Ag., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Anis Masruri, S.Ag., SIP., M.Si. selaku pembimbing skripsi yang dengan ikhlas telah meluangkan waktunya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Nurdin Laugu, S.Ag., SIP. M selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan dukungan selama masa kuliah.
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh staf Tata Usaha (TU) Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Drs. Bambang Supriyono, M.M selaku kepala SMAN 1 Yogyakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di SMAN 1 Yogyakarta. Ibu Dra. Sri Niarti selaku wakil kepala urusan hubungan masyarakat yang telah memberikan arahan dan bantuannya selama penelitian berlangsung. Bapak Drs. Basuki selaku wakil kepala urusan kurikulum yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penelitian berlangsung. Seluruh staff, guru, dan karyawan SMAN 1 Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan maupun dukungannya.
9. Bapak Arsidi, mbak Deti, mbak Fitri selaku pustakawan SMAN 1 Yogyakarta terimakasih atas kerjasama dan bantuannya selama ini.

10. Seluruh keluarga besar penulis Bapak Margono (ALM), Ibu Kartinah dan seluruh keluarga besar Bapak Endang Suhar (ALM), Ibu Entin atas do'a, perhatian, kasih sayang, semangat dan dorongannya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat seperjuanganku: Heni, Noe, Wina, Lala, Mila, dan Justin. Betapa indahny persahabatan kita. Tetep semangat!

12. KH. Najib Salimi atas do'a dan nasehatnya, dan seluruh keluarga besar PP. Pesantren Al-luqmaniyyah, Umbul Harjo, Yogyakarta atas do'a dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini.

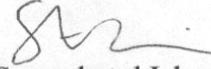
13. Teman-teman kelas: Jumadi, Friska, Wahid, Arip, Afif, Albana, Toni, Ayu', Uul, Uus, Mila Daimah, Azik, Ana Rizka, Yani, Zu2n, Via dan temen-teman angkatan 2005 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini. Semoga persahabatan kita tetap terjalin.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini.

Puji dan syukur kepada Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini agar dapat lebih baik seperti yang diinginkan.

Yogyakarta, 26 Nopember 2009

Penulis



Siti Suwaebatul Islamiyah

# EVALUASI KETERSEDIAAN KOLEKSI BERDASARKAN STUDI TERHADAP SILABI KELAS INTERNASIONAL DI PERPUSTAKAAN SMAN 1 YOGYAKARTA

Siti Suwaebatul Islamiyah  
Nim. 05140029

## INTISARI

Penelitian ini berjudul evaluasi ketersediaan koleksi berdasarkan studi terhadap silabi kelas internasional di perpustakaan SMAN I Yogyakarta. Pengertian evaluasi ketersediaan koleksi di dalam penelitian ini adalah suatu proses untuk mendeskripsikan dan mengukur ketersediaan koleksi di perpustakaan dengan menggunakan criteria tertentu, guna dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan untuk mengetahui sejauh mana ketersediaan koleksi kelas internasional. Teknik-Teknik pengukuran atau evaluasi koleksi dapat dibagi dua, yaitu: teknik yang berfokus pada koleksi dan berfokus pada pengguna.

Penelitian ini menggunakan teknik yang berfokus pada koleksi, yang bertujuan untuk mengukur besarnya suatu koleksi dengan memanfaatkan daftar tertentu (*checklist*). Daftar yang dimaksud adalah catalog atau bibliografi yang dikaji dari silabi kelas internasional SMAN I Yogyakarta semester 2 tahun ajaran 2008/2009 dan mencakup kegiatan lain seperti pemeriksaan koleksi di rak sebagai bahan *crosscheck* di perpustakaan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang bersifat *explorative* atau *developmental*. Data yang dikumpulkan menggunakan observasi untuk mendapat data primer dengan cara *crosscheck* langsung di perpustakaan, dokumentasi dan wawancara.

Dari pembahasan dan analisis terhadap semua data, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh mata pelajaran kelas internasional sudah tersedia koleksinya di perpustakaan SMAN I Yogyakarta dengan prosentase 38,19% yang berarti bahwa hampir setengahnya koleksi sumber belajar telah tersedia di perpustakaan.

Kata kunci: perpustakaan sekolah, silabi kelas internasional, metode evaluasi koleksi

**EVALUATION OF COLLECTION AVAILABILITY BASED ON THE  
STUDIES OF THE LOCAL CONTENT SUBJECT TOWARDS  
INTERNATIONAL CLASS SYLLABUS IN THE LIBRARY OF STATE  
SENIOR HIGH SCHOOL 1 YOGYAKARTA**

**Oleh: Siti Suwaebatul Islamiyah**  
**Nim. 05140029**

**ABSTRACT**

The research is entitled evaluation of collection availability based on the studies of the local content subject towards international class syllabus in the Library of State Senior High School 1 Yogyakarta. Evaluation collection availability in this research means a process to describe and measure the collection availability in the library by using particular criteria in order to be able to analyze and to know how far the collection availability of the local content subject based on the studies to international class syllabus in Library of State Senior High School 1 Yogyakarta. The measurement techniques are focused on collection and user.

The research uses a technique focusing on collection that aims to measure the number of a collection using a particular check list. The check list here means catalogues or bibliographies, which are studied from the international class syllabus semester 2, 2008/2009 and cover other activities like collection check on the self as a cross check matter in the library.

The research approach is descriptive, explorative and developmental. The research applies observation data, collection technique in order to get primary data by direct cross check in the library, documentation, and interview.

Based on the studies and analysis of the data, the result of the research shows that all of the international class subject had already got their collection or reference source in the library percentage of 38,19% that mean almost a half of the collection availability in the library.

Keyword: school library, international class syllabus, collection evaluation method.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9



4.1. Sejarah Singkat.....	49
4.2. Bangunan Fisik.....	51
4.3. Visi dan Misi Perpustakaan.....	51
4.4. Layanan Perpustakaan.....	52
4.5. Fasilitas Perpustakaan.....	54
4.6. Sumber Daya Manusia (SDM) Perpustakaan.....	55
4.7. Koleksi Perpustakaan.....	59
4.8. Struktur Organisasi.....	60
4.9. Anggaran Dana.....	61
4.10. Tata Tertib Perpustakaan.....	62
4.11. Alur Penggunaan Fasilitas dan Layanan.....	69
<b>BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>70</b>
5.1. Ketersediaan Koleksi Setiap Silabi Mata Pelajaran Kelas Internasional.....	71
5.2. Ketersediaan Koleksi Setiap Kelompok Mata Pelajaran Kelas Internasional.....	81
5.3. Ketersediaan Koleksi Setiap Kelas Internasional.....	83
5.4. Ketersedian Koleksi Secara Keseluruhan.....	84

BAB VI: PENUTUP.....	86
6.1. Simpulan.....	86
6.2. Saran.....	86
Daftar Pustaka.....	88
Lampiran-Lampiran.....	91

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Pembagian Tugas Pustakawan.....	57
Tabel 5.1.1. Ketersediaan koleksi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.....	71
Tabel 5.1.2. Ketersediaan koleksi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.....	72
Tabel 5.1.3. Ketersediaan koleksi mata pelajaran Bahasa Indonesia.....	73
Tabel 5.1.4. Ketersediaan koleksi mata pelajaran Bahasa Inggris.....	73
Tabel 5.1.5. Ketersediaan koleksi mata pelajaran matematika.....	74
Tabel 5.1.6. Ketersediaan koleksi mata pelajaran fisika.....	74
Tabel 5.1.7. Ketersediaan koleksi mata pelajaran Biologi.....	75
Tabel 5.1.8. Ketersediaan koleksi mata pelajaran kimia.....	75
Tabel 5.1.9. Ketersediaan koleksi mata pelajaran Sejarah.....	75
Tabel 5.1.10. Ketersediaan koleksi mata pelajaran Geografi.....	76
Tabel 5.1.11. Ketersediaan koleksi mata pelajaran Ekonomi.....	76
Tabel 5.1.12. Ketersediaan koleksi mata pelajaran Sosiologi.....	76
Tabel 5.1.13. Ketersediaan koleksi mata pelajaran Seni Rupa.....	77
Tabel 5.1.14. Ketersediaan koleksi mata pelajaran Seni Tari.....	77

Tabel 5.1.15. Ketersediaan koleksi mata pelajaran Pend. Olahraga, Jasmani, dan Kesehatan.....	78
Tabel 5.1.16. Ketersediaan koleksi mata pelajaran TI dan Komunikasi.....	78
Tabel 5.1.17. Ketersediaan koleksi mata pelajaran Bahasa Jepang.....	79
Tabel 5.1.18. Ketersediaan koleksi mata pelajaran Bahasa Arab.....	79
Tabel 5.1.19. Ketersediaan koleksi mata pelajaran Bahasa Mandarin.....	80
Tabel 5.1.20. Ketersediaan koleksi mata pelajaran Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa.....	80
Tabel 5.2.1. Ketersediaan Koleksi Setiap Kelompok Mata Pelajaran Kelas Internasional.....	81
Tabel 5.3.1. Ketersediaan Koleksi Setiap Kelas.....	83
Tabel 5.4.1. Ketersediaan Koleksi Secara Keseluruhan.....	84

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1. Struktur Organisasi Perpustakaan SMAN I Yogyakarta.....60
- Gambar 4.2. Alur Penggunaan Fasilitas dan Layanan Perpustakaan SMAN I Yogyakarta.....69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sekolah adalah suatu lembaga yang memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Sekolah sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan pengajaran dan kesempatan belajar sudah barang tentu harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain: murid, guru, program pendidikan, sarana, dan fasilitas yang disusun dan diatur menurut pola dan sistematika tertentu sehingga memungkinkan kegiatan belajar dan mengajar berlangsung dan terarah pada pembentukan dan pengembangan siswa (Hamalik, 2008:5-6).

Salah satu upaya untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 50 Ayat (3), yakni Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah yang bertaraf internasional.

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) merupakan sekolah nasional dengan standar mutu internasional. Proses belajar mengajar di sekolah ini menekankan pengembangan daya kreasi, inovasi, dan eksperimentasi untuk memacu ide-ide baru yang belum pernah ada. Standar internasional yang dituntut dalam SBI adalah standar kompetensi lulusan, kurikulum, proses belajar mengajar, sumber

daya manusia (SDM), fasilitas, manajemen, pembiayaan, dan penilaian standar internasional, proses belajar mengajar disampaikan dalam dua bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (<http://www.wikipedia.org./sekolah> bertaraf internasional).

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya kepada setiap satuan pendidikan, khususnya bagi yang sudah mampu melakukan. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan diberi kebebasan dan keleluasaan dalam mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Pengembangan silabi yang dilakukan oleh satuan pendidikan harus tetap berada dalam bingkai pengembangan kurikulum nasional (standar nasional).

Kurikulum Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) merupakan salah satu hasil pengembangan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berlaku di masing-masing sekolah yang disesuaikan dengan satuan pendidikan, potensi sekolah atau daerah, karakteristik sekolah atau daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. KTSP juga merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum, yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan, dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah (Mulyasa, 2007:20-21).

Layanan kelas internasional atau layanan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang dikembangkan oleh SMAN I Yogyakarta adalah hasil kerjasama dengan instansi atau lembaga pendidikan lain yaitu Cambridge University. Kurikulum yang dikembangkan merupakan perpaduan antara kurikulum nasional dan kurikulum internasional dari Cambridge University yaitu CIE (*Cambridge Internasional Examination*) untuk pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi (Asrofi, 2008:1). Menurut Asykin (2006:8) proses belajar mengajar kurikulum Cambridge University, menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Menurut Bapak Basuki tujuan dari kerjasama ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan siswa agar mampu bersaing bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga tingkat internasional<sup>1</sup>. Program ini juga bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar bisa melanjutkan pendidikan ke Cambridge University tanpa ujian kembali untuk menempuh pendidikan di Cambridge University<sup>2</sup>.

Silabi layanan kelas internasional atau silabi layanan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) merupakan rencana pembelajaran yang akan dilakukan terkait dengan mata pelajaran yang akan diajarkan di sekolah yang bersangkutan. Layanan kelas internasional atau layanan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang dikembangkan oleh SMAN I Yogyakarta berlaku untuk kelas X, XI, dan XII. Kelas ini meliputi 9 kelas pada kelas X, 8

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Basuki (Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum) pada Tanggal 20 Agustus 2009 WIB.

<sup>2</sup> Ibid

kelas pada kelas XI, dan 2 kelas pada kelas XII<sup>3</sup>. Mata pelajaran yang diajarkan pada kelas X meliputi: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Pendidikan Jasmani (Olahraga dan Kesehatan), Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Seni Budaya (Seni Rupa), Seni Tari, Bahasa Jepang, Bahasa Arab, Bahasa Mandarin, Bahasa Sastra dan Budaya Jawa (Kumpulan Silabus Layanan RSBI SMA Negeri I Yogyakarta, 2008).

Mata pelajaran yang diajarkan pada kelas XI meliputi: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Pendidikan Jasmani (Olahraga dan Kesehatan), Teknologi Informasi dan Komunikasi, Seni Budaya (Seni Rupa), Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, Bahasa Sastra dan Budaya Jawa. Mata pelajaran yang diajarkan pada kelas XII meliputi: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Pendidikan Jasmani (Olahraga dan Kesehatan), Teknologi Informasi dan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Basuki (Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum) pada Tanggal 20 Agustus 2009 WIB.

Komunikasi (Kumpulan Silabus Layanan Kelas Internasional SMA Negeri I Yogyakarta, 2008).

Perpustakaan sekolah merupakan bagian penting dari komponen pendidikan yang tidak bisa dipisahkan keberadaannya dari lingkungan sekolah. Sebagai salah satu sarana pendidikan, perpustakaan sekolah berfungsi sebagai penunjang belajar siswa, membantu siswa dan guru dalam memacu tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Penyelenggaraan perpustakaan sekolah itu sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 45 ayat 1 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Selain itu, penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah juga mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Di dalam pasal 23 ayat 1 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa setiap sekolah atau madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Menurut Mulyasa (2007:237) salah satu sarana peningkatan profesionalisme guru adalah tersedianya buku sumber yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi guru. Layanan pustaka

di perpustakaan perlu diarahkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan guru akan materi pembelajaran. Koleksi perpustakaan adalah sejumlah bahan atau sumber-sumber informasi yang dikelola untuk kepentingan proses belajar dan mengajar di sekolah yang bersangkutan (Yusuf, 2007:2).

Buku teks sebagai salah satu jenis koleksi perpustakaan sekolah, memegang peranan yang sangat penting di dalam proses pembelajaran. Karena dalam proses implementasi kurikulum, yang terpenting terletak pada kegiatan belajar mengajar. Pada proses itu buku teks merupakan sumber belajar yang sangat strategis bagi siswa dan guru untuk dipelajari agar tujuan-tujuan instruksional kurikulum dapat tercapai (Suyanto dan Hisyam, 2000:121). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran menyebutkan bahwa buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.

Pengembangan koleksi yang dilakukan di dalam dunia perpustakaan merupakan upaya untuk menyatakan apa saja yang akan diadakan di perpustakaan. Pengembangan koleksi yang dilakukan oleh perpustakaan sekolah harus disesuaikan dengan kurikulum satuan pendidikan yang

bersangkutan. Menurut manifesto perpustakaan sekolah yang diterbitkan oleh IFLA (*International Federation of Library Associations*) (2002:13) menyatakan bahwa, paling sedikit 60% koleksi perpustakaan terdiri buku nonfiksi yang berkaitan dengan kurikulum.

Kajian dalam bentuk evaluasi koleksi adalah bagian dari kegiatan pengembangan koleksi. Kegiatan evaluasi inilah yang akan mengarahkan fungsi perpustakaan agar koleksi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan informasi penggunanya. Mengingat pentingnya kualitas koleksi perpustakaan dalam mempengaruhi keberhasilan pendidikan dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa dan meningkatkan profesionalisme guru kelas internasional, maka perlu diadakan suatu kajian yang mendalam dalam bidang evaluasi koleksi. Terkait dengan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap koleksi perpustakaan SMAN I Yogyakarta berdasarkan studi terhadap silabi layanan kelas internasional semester 2 tahun ajaran 2008/2009. Terkait dengan pemilihan lokasi, penulis tertarik melakukan penelitian di SMAN I Yogyakarta dikarenakan SMAN I Yogyakarta menjadi pusat pelaksanaan ujian kurikulum Cambridge University yang dilaksanakan oleh sekolah yang bertaraf internasional di seluruh Indonesia dalam rangka mempersiapkan siswa atau siswi agar bisa menempuh pendidikan di Cambridge University tanpa ujian kembali.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah ketersediaan koleksi perpustakaan untuk setiap silabi mata pelajaran layanan kelas internasional berdasarkan studi terhadap silabi mata pelajaran layanan kelas internasional SMAN I Yogyakarta semester 2 tahun ajaran 2008/2009?
2. Bagaimanakah ketersediaan koleksi perpustakaan untuk setiap kelompok mata pelajaran layanan kelas internasional berdasarkan studi terhadap silabi mata pelajaran kelas internasional SMAN I Yogyakarta semester 2 tahun ajaran 2008/2009?
3. Bagaimanakah ketersediaan koleksi perpustakaan setiap kelas layanan kelas internasional berdasarkan studi terhadap silabi mata pelajaran kelas internasional SMAN I Yogyakarta semester 2 tahun ajaran 2008/2009?
4. Bagaimanakah ketersediaan koleksi perpustakaan secara keseluruhan berdasarkan studi terhadap silabi layanan kelas internasional SMAN I Yogyakarta semester 2 tahun ajaran 2008/2009?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan bagaimanakah ketersediaan koleksi perpustakaan untuk setiap silabi mata pelajaran layanan kelas internasional berdasarkan studi terhadap silabi mata pelajaran layanan kelas internasional SMAN I Yogyakarta semester 2 tahun ajaran 2008/2009.

2. Mendeskripsikan bagaimanakah ketersediaan koleksi perpustakaan untuk setiap kelompok mata pelajaran layanan kelas internasional berdasarkan studi terhadap silabi mata pelajaran kelas internasional SMAN I Yogyakarta semester 2 tahun ajaran 2008/2009.
3. Mendeskripsikan bagaimanakah ketersediaan koleksi perpustakaan setiap layanan kelas internasional berdasarkan studi terhadap silabi mata pelajaran kelas internasional SMAN I Yogyakarta semester 2 tahun ajaran 2008/2009.
4. Mendeskripsikan bagaimanakah ketersediaan koleksi perpustakaan secara keseluruhan berdasarkan studi terhadap silabi layanan kelas internasional SMAN I Yogyakarta semester 2 tahun ajaran 2008/2009.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada kepala sekolah sebagai pihak pembuat keputusan, terutama terhadap pentingnya peran yang diambil berkaitan dengan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan di dalam memenuhi seluruh kebutuhan sivitas akademika SMAN I Yogyakarta.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi tenaga pengajar supaya berperan aktif membantu perpustakaan dalam memenuhi bahan ajar terutama literatur yang terdapat pada silabi mata pelajaran layanan kelas internasional SMAN I Yogyakarta semester 2 tahun ajaran 2008/2009.
3. Memperkaya khasanah keilmuan khususnya dalam bidang evaluasi koleksi perpustakaan sebagai salah satu cara tercapainya tujuan perpustakaan sekolah.

#### **1.4. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian pembahasan secara sistematis sehingga terlihat jelas kerangka skripsi yang akan ditulis. Dalam penelitian ini penulis merumuskan konsep pembahasan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II. Kajian pustaka dan landasan teori. Bab ini memuat kajian pustaka, yang merupakan penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain yang mempunyai objek sejenis atau hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini. Sedangkan landasan teori adalah teori atau literatur yang digunakan, berhubungan dengan evaluasi dan pengembangan koleksi perpustakaan sekolah.

Bab III. Metode penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam pengambilan dan analisis datanya.

Bab IV. Gambaran umum perpustakaan SMAN I Yogyakarta. Pada bab ini penulis menggambarkan subjek yang diteliti yaitu perpustakaan SMAN I Yogyakarta.

Bab V. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Di dalam bab ini penulis akan mengemukakan hasil penelitian dengan menginterpretasikan data dari hasil persentase dari seluruh sumber mata pelajaran layanan kelas internasional semester 2 tahun ajaran 2008/2009 di SMAN I Yogyakarta.

Bab VI. Penutup. Pada bab ini penulis akan mengemukakan simpulan dan saran dari hasil penelitian.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Simpulan**

1. Prosentase rata-rata ketersediaan koleksi untuk setiap silabi mata pelajaran kelas internasional adalah 48,37% yang berarti hampir setengah dari sumber belajar tersedia di perpustakaan.
2. Prosentase rata-rata ketersediaan koleksi untuk setiap kelompok mata pelajaran kelas internasional adalah 52,75% yang berarti sebagian besar dari sumber belajar tersedia di perpustakaan.
3. Prosentase rata-rata ketersediaan koleksi untuk setiap kelas internasional adalah 38,17% yang berarti hampir setengah dari sumber belajar tersedia di perpustakaan.
4. Ketersediaan koleksi sumber belajar kelas internasional secara keseluruhan di perpustakaan SMAN I Yogyakarta persentasenya adalah 38,19% yang berarti hampir setengah dari sumber belajar tersedia di perpustakaan.

#### **6.2. Saran**

Ada beberapa saran yang dapat penulis kemukakan berkaitan dengan ketersediaan koleksi sumber belajar kelas Internasional di perpustakaan SMAN I Yogyakarta.

1. Secara berkala dan terus-menerus perpustakaan SMAN I Yogyakarta melaksanakan evaluasi koleksi untuk mengetahui apakah koleksi yang

dimiliki sesuai dengan visi dan misi perpustakaan SMAN I Yogyakarta sebagai salah satu sarana penunjang kegiatan belajar mengajar di SMAN I Yogyakarta.

2. Pengadaan koleksi sumber belajar yang terkait dengan kebutuhan kurikulum layanan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional selama ini menjadi wewenang bidang kurikulum diharapkan melaksanakan kerjasama dengan perpustakaan agar tidak terjadi ketimpangan koleksi antara mata pelajaran satu dengan yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohamad. 1985. *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Bandung: Sinar Baru.
- Andriza, Denny. 2007. “*Ketresediaan Koleksi Buku Teks Perpustakaan Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta Menurut Silabi Kurikulum KTSP*”. (Skripsi) Program Studi Ilmu Perpustakaan Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asrofi. 2009. “*SBI Menyongsong Masa Depan - Pena Pendidikan*”. Dalam [www.penapendidikan.com](http://www.penapendidikan.com), akses tanggal 25 Maret 2009, pukul 13:00 WIB.
- Asyikin. 2006. “*Berkiblat Pada Kurikulum Cambridge University*”. Dalam [www.gemari.or.id/file/gemari697-8.PDF](http://www.gemari.or.id/file/gemari697-8.PDF). Akses taggal 25 Maret 2009, pukul 13:15 WIB.
- Azwar, Saifuddin. 2004. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bafadal, Ibrahim. 2006. *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Akademik Press.
- CIE Profesional Development for Teachers. Dalam <http://www.cie.uk/profiles/teachers/support>. Akses Pada Tanggal 22 September 2009 Pukul 11:30 WIB.
- Darmono. 2001. *Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Gramedia.
- Evans, G. Edward. 1955. *Developing Library an Information Centre Collection Development*. Colorado: Libraries Unlimited-Englewood.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Andi Ofset.
- Hamalik, Oemar. 2008. *Prososes Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamalik, Oemar. 1990. *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Hardi, Wisnu. 2006. “*Conspectus Model in Library Science*”. Dalam <http://conspectus-reload.tripod.com>. akses tanggal 25 Maret 2009, pukul 12:30 WIB.
- Hidayah, Farida Nur. (t.t). “Pengembangan Koleksi Perpustakaan”. Dalam [www.uinsuka.info](http://www.uinsuka.info). Akses Tanggal 31 Mei 2009, Pukul 10:30 WIB.
- Huzaimatusa’diyah. 2007. “*Evaluasi Ketersediaan Koleksi Berdasarkan Kajian Terhadap Silabi Mata Pelajaran Muatan Lokal di Perpustakaan MAN Yogyakarta III*”. (Skripsi). Program Studi Ilmu Perpustakaan Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- IFLA. 2002. “IFLA: Pedoman Perpustakaan Sekolah/UNESCO”. Dalam <http://www.ifla.org/VII/sII/pubs/school-guidelines.htm>, akses tanggal 20 Maret 2009, pukul 10:00 WIB.
- Akademic Information System. Dalam [http://sman1teladan-yog.src.id/akademic information system](http://sman1teladan-yog.src.id/akademic-information-system). Akses Pada Tanggal 22 September 2009 Pukul 11:30 WIB.
- Kumpulan Silabus Layanan Kelas Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMAN I Yogyakarta. 2008. Yogyakarta: SMAN I Yoyakarta.
- Kumpulan Silabus Layanan Kelas Internasional SMAN I Yogyakarta. 2008. Yogyakarta: SMAN I Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Sebuah Panduan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Masnur. 2007. *KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) Dasar Pemahaman dan Pengembangan: Pedoman Bagi Pengelola Lembaga Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Dewan Sekolah, dan Guru*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ningsih, Rati Novita. 2009. “*Evaluasi Ketersediaan Koleksi di Perpustakaan SMA Negeri 5 Yogyakarta (Berdasarkan Kajian Terhadap Silabus Kurikulum KTSP Mata Pelajaran Muatan Lokal)*”. (Skripsi). Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Kelas Khusus Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Prihati, Yuni. 2007. “*Evaluasi Ketersediaan Koleksi Buku UPT Perpustakaan Akademi Kebidanan YLPP Purwokerto: Kajian Berdasarkan Daftar Bibliografi*”.

yang Dirujuk dalam GBPP Kurikulum Pendidikan Diploma III Kebidanan”. (skripsi). Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Kelas Khusus Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Prianto, Joko Sugeng. 2008. “*Evaluasi Pemanfaatan dan Ketersediaan Koleksi dengan Menggunakan Analisis Sitasi Terhadap Tesis Progam Magister Teknik Sipil UII tahun 2007 di perputakaan PMTS FTSP UII Yogyakarta*”. (skripsi). Program Studi Ilmu Perpustakaan Kelas Khusus Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijag Yogyakarta.

Purwadarminta, W. J. S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Qalyubi, Syihabuddin, dkk. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sinaga, Dian. 2005. *Perpustakaan Sekolah: Peranannya Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Kreasi Media Utama.

Sudijono, Anas. 2005. *Pengantar Statistic Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sudijono, Anas. 2001. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R, D*. Bandung: Alfabeta

Sukmadinata, Syaodih. 2008. *Perkembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suyanto dan Hisyam. 2000. *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Tilaar. 2004. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Widarti. 2008. “*Evaluasi Ketersediaan Koleksi di Perpustakaan SMPN I Depok (Berdasarkan Kajian Terhadap Silabi Kurikulum 2006)*”. (Skripsi). Program Studi Ilmu Perpustakaan Kelas Khusus Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijag Yogyakarta.

Yusuf, Pawit M dan Yaya Suhendar. 2007. *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Data hasil *crosscheck* ketersediaan sumber belajar mata pelajaran kelas internasional di perpustakaan SMAN I Yogyakarta.

### 1. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas X

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Buku PAI Kelas X. Hamid, M.Ag.Harapan Baru, 2006. Jakarta	√	
2.	Tafsir Al-Qur'an dan Terjemahan. Depag RI. 2006. Jakarta		√
3.	Al-Qur'an dan terjemahan. Depag RI. 2006. Jakarta	√	
4.	Buku PAI Kelas X. Syamsuri, dkk. 2006. Jakarta: Erlangga	√	
5.	Hukum Zakat. Yusuf Qardawi, Litera Antar Nusa.2007. Jakarta	√	
6.	Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq, Darul Fikr, 1993.Bairut	√	

### 2. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas XI

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Al-Qur'an dan terjemahan. Depag RI. 2006. Jakarta	√	
2.	Buku PAI Kelas XI. Drs. Margiyono, M.Pd, dkk. 2006. Yudistira	√	
3.	Buku PAI Kelas XI. Hamid, M.Ag.Harapan Baru, 2006. Jakarta		√
4.	Buku PAI Kelas XI. Syamsuri, dkk. 2006. Jakarta: Erlangga	√	

## 3. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas XI

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		ada	Tidak ada
1.	Al-Qur'an dan terjemahan. Depag RI. 2006. Jakarta	√	
2.	Buku PAI Kelas XII. Drs. Margiyono, M.Pd, dkk. 2006. Yudistira		√
3.	Buku PAI Kelas XII. Hamid, M.Ag.Harapan Baru, 2006. Jakarta		√
4.	Buku PAI Kelas XII. Hamid, M.Ag.Harapan Baru, 2006. Jakarta		√

## 4. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas X

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		ada	Tidak ada
1.	Budiyanto. Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X, Erlangga. Jakarta.2007		√
2.	J.C.T. Simorangkir, SH.Dr. Hukum dan Konstitusi Indonesia. Jakarta: PT. Gunung Agung. 1986		√
3.	Moh. Kusnardi,Harmaily Ibrohim. Pengantar Hukum Tata Negara RI. Jakarta: THUF. 1993	√	
4.	Mustafa Kemal Pasha, Drs. Ed. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan (civics educations) Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri		√
5.	M.S. Kaelan H,Drs.Fakultas Filsafat UGM. Pendidikan Pancasila, Ed. Reformasi , Paradigma, Yogyakarta.2003	√	
6.	Retno Listyarti. Kewarganegaraan SMA Kelas X. ESIS. Jakarta. 2007	√	
7.	Andar Rujito, dkk. Tata Negara untuk Kelas 3. Kanisius, Yogyakarta.1999		√
8.	CT. Cansil. Aku Warga Negara Indonesia. Jakarta. 1976		√
9.	Nimmo. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media. PT. Remaja Rosdakarya Bandung.1999		√
10.	Suwardi Harsono, Dr Prof. Sanjaya Djuarsa, Sasa PHD. H.H. Budi Setio, Drs. Politik Demokrasi dan Manajemen Komunikasi, Galang Press. 2002		√

## 5. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas XI

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		ada	Tidak ada
1.	J.G. Starke. 2003. Pengantar Hukum Internasional edisi ke-10. Jakarta: Sinar Grafika		√
2.	Buku Kewarganegaraan Kelas XI. Dra. Retno Listyarti. Erlangga. 2007	√	
3.	Rebaca M.M. Wallace, Sweet dan Maxwell London. Penerjemah Bambang Arumanadi SH. MSc. 1993. Hukum Internasional. Semarang: IKIP Semarang Press		√
4.	Syuffri Yusuf, SH. 1989. Hubungan Internasional dan Politik LN: Sebuah Analisis Teoritis dan Uraian Tentang Pelaksanaannya. Jakarta: CV. Muliasari.		√
5.	Buku Tata Negara. Media Elektronika		√
6.	Boer Mauna. Hukum Internasional		√

## 6. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas XII

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		ada	Tidak ada
1.	UU Pers		√
2.	UU Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat		√
3.	Masduki. Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik		√
4.	Buku Kewarganegaraan Kelas XII. Dra. Retno Listyarti. Erlangga. 2007	√	

## 7. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas X

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		ada	Tidak ada
1.	Buku Tata Bahasa Indonesia. Anton Moelyono	√	
2.	Buletin Ilmiah Narasi dan Argumentasi, Gorys Keraf		√
3.	Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan		√
4.	Panjedar Sastra. Dr. C. Hooykaas		√
5.	Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia. Ajip Rosidi		√
6.	Apresiasi Puisi. Herman Waluyo	√	
7.	Dari Fansuri ke Handayani. Taufik Ismail		√
8.	Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Taufik Ismail	√	
9.	Menulis Secara Populer. Ismail Marahimin		√
10.	Argumentasi dan Narasi. Gorys Keraf		√

## 8. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		ada	Tidak ada
1.	Panjedar Sastra. Dr. C. Hooykaas		√
2.	Novel Indonesia Mutakhir. Jakop Sumarjo		√
3.	Surat-Menyurat. Lamuddin Finoza		√
4.	Pedoman dan Petunjuk Praktis Karya Tulis. Drs. H. Anwar Hasmin		√
5.	Argumentasi dan Narasi. Gorys Keraf		√
6.	Menulis Secara Populer. Ismail Marahimin		√
7.	Dari Eve Maria ke Jalan Roma. Idrus	√	
8.	Tiga Kota. Nugroho Noto Susanto		√
9.	Godlob. Danarto		√
10.	Drama Formal dan Teater Remaja. Loren E Taylor		√

## 9. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas XII

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		ada	Tidak ada
1.	Komposisi. Gorys Keraf		√
2.	Argumentasi dan Narasi. Gorys Keraf		√
3.	Drama Formal dan Teater Remaja. Loren E Taylor		√
4.	Puisi Lama. Sutan Takdir Alisjahbana	√	
5.	Apresiasi Puisi. Herman J. Waluyo	√	
6.	O' Amuk Kapak. Sutarji		√
7.	Cal Zoum. Bachri		√
8.	Kritik Sastra. HB. Jasmin		√

## 10. Mata pelajaran Bahasa Inggris X

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Th. M. Sudarwati, Euddia Grace 2005. Look A Head 2. Jakarta: Erlangga	√	
2.	James Kaely, Donna Innes. 2004. SHENANIGEMES. USA. Pro Lingua Associates		√
3.	Penny Ur. 2004. Grammar Practise Activities. Cambridge: Cambridge University Press		√
4.	Helen Toner and Elizabeth Whitton. 2006. English Language and Literatur As-Level. Cambridge: Cambridge University Press		√

	Vacabulary in Use Intermediate. Jakarta: Erlangga		
5.	Stuard Redman. 2001. English Vacabulary in Use Intermediate. Jakarta: Erlangga		√
6.	Raymon C. Clar. 2004. Nasreddin Hadjo. USA: Pro Lingua Associates		√
7.	Heater Jones. Robyn Mann. 1998. Stepping Forward 2. Singapore: Pan Pacific Publications (S) Pte Ltd.		√

## 11. Mata pelajaran Bahasa Inggris X

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Th. M. Sudarwati, Euddia Grace 2005. Look A Head 1. Jakarta: Erlangga	√	
2.	Penny Ur. 2004. Grammar Practise Activities. Cambridge: Cambridge University Press		√
3.	James Kaely, Donna Innes. 2004. SHENANIGEMES. USA. Pro Lingua Associates		√
4.	Helen Toner and Elizabeth Whitton. 2006. English Language and Literatur As-Level-Cambridge: Cambridge University Press Vacabulary in Use Intermediate. Jakarta: Erlangga		√
5.	Peter Lucantoni, Marian Cox, Bob Clover. 2001. English as a Second Language UK. Cambridge University Press	√	

## 12. Mata pelajaran Matematika kelas X

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Hugh Neil and Douglas Quadling. 2005. Pure Mathematics 1. Cambridge University	√	
2.	Hugh Neil and Douglas Quadling. 2005. Pure Mathematics 2,3. Cambridge University	√	
3.	Sartono Wradikrama. 2001. Matematika SMA. Erlangga	√	

## 13. Mata pelajaran Matematika kelas XI

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Hugh Neil and Douglas Quadling. 2005. Pure Mathematics 2,3. Cambridge University	√	
2.	Hugh Neil and Douglas Quadling. 2005. Pure Mathematics 1,2,3. Cambridge University	√	
3.	YM. Chow C.J, KM. Koh, K.D. Ling S.C. Shee. 2001. College Mathematics 2. SNP PAN Pacific.	√	

## 14. Mata pelajaran Matematika kelas XII

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Sartono, Wiradikromo. 2001. Matematika SMA. Erlangga	√	

## 15. Mata pelajaran Fisika kelas X

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Kanginan, Marthen. 2006. Fisika untuk SMA Kelas X. Jakarta: Erlangga	√	
2.	Loo Kwok Wai, Ong Bee Hoo. 2003. Longman A-level Course in Physics vol 1 Pearson Education South Asia Pte Ltd.	√	
3.	Sunardi, Etsa Indra Irawan. 2007. Fisika Bilingual untuk SMA Kelas X. Bandung:Yrama Widya	√	

## 16. Mata pelajaran Fisika kelas X I

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Kanginan, Marthen. 2006. Fisika untuk SMA Kelas XI. Jakarta: Erlangga	√	
2.	Loo Kwok Wai, Ong Bee Hoo. 2003. Longman A-level Course in Physics vol 1 Pearson Education South Asia Pte Ltd	√	
3.	Sunardi, Etsa Indra Irawan. 2007. Fisika Bilingual untuk SMA Kelas X. Bandung:Yrama Widya		√
4.	Loo Kwok Wai, Ong Bee Hoo. 2003. Longman A-level Course in Physics vol 2 Pearson Education South Asia Pte Ltd.	√	

## 17. Mata pelajaran Fisika kelas XII

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Kanginan, Marthen. 2006. Fisika untuk SMA Kelas XII. Jakarta: Erlangga	√	
2.	Loo Kwok Wai, Ong Bee Hoo. 2003. Longman A-level Course in Physics vol 2 Pearson Educatiaon South Asia Pte Ltd.	√	
3.	Sunardi, Etsa Indra Irawan. 2007. Fisika Bilingual untuk SMA Kelas X. Bandung:Yrama Widya		√

## 18. Mata pelajaran Biologi kelas X

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	DA. Pratiwi. 2004. Biologi SMA. Jakarta: Erlangga	√	
2.	Istamar Syamsuri. Biologi SMA. 2004. Jakarta: Erlangga	√	
3.	Cambell, dkk. Biology jilid 1,2,3. 2006. Jakarta: Erlangga	√	

## 19. Mata pelajaran Biologi kelas XI

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	DA. Pratiwi. 2004. Biologi SMA. Jakarta: Erlangga	√	
2.	Istamar Syamsuri. Biologi SMA. 2004. Jakarta: Erlangga	√	
3.	Cambell, dkk. Biology jilid 3. 2006. Jakarta: Erlangga	√	

## 20. Mata pelajaran Biologi kelas XII

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Cambell, dkk. Biology. 2006. Jakarta: Erlangga	√	

## 21. Mata pelajaran Kimia kelas X

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Depdikbud. 1994. Buku Kimia 1. Jakarta: Balai Pustaka		√
2.	Mechael Purba. 2007. Kimia 1. Jakarta: Erlangga	√	
3.	Brian Ratclif. 2004. Chemistry, as-level and a level. Cmbridge	√	

## 22. Mata pelajaran Kimia kelas XI

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Depdikbud. 1994. Buku Kimia 2. Jakarta: Balai Pustaka		√
2.	Mechael Purba. 2007. Kimia 2. Jakarta: Erlangga	√	
3.	Brian Ratclif. 2004. Chemistry, as-level and a level. Cmbridge	√	

## 23. Mata pelajaran Kimia kelas XII

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Depdikbud. 1994. Buku Kimia 3. Jakarta: Balai Pustaka		√
2.	Mechael Purba. 2007. Kimia 3. Jakarta: Erlangga	√	
3.	Brian Ratclif. 2004. Chemistry, as-level and a level. Cmbridge	√	

## 24. Mata pelajaran Sejarah kelas X

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Iwayan Bardika. 2006. Sejarah SMA Kelas X. Jakarta: Erlangga	√	
2.	Sukmono R. 1985. Sejarah Kebudayaan Indonesia I. Yogyakarta: Kanisius		√

## 25. Mata pelajaran Geografi kelas X

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Nursia, Sumaatmadja. 1998. Studi Geografi. Bandung: Alumni		√
2.	Suyono, Sosrodarsono. 1990. Hidrologi untuk Pengairan. Jakarta: Pradnya Paramita		√

## 26. Mata pelajaran Ekonomi kelas X

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Economics. Paul A. Samuelson. York Graphic Services. Inc. Fifteenth Editions		√
2.	Makro Ekonomi. Thomas F. Dembura. Erlangga, Jakarta. 1999	√	
3.	Ekonomi untuk SMA dan MA. Kelas X. Alam S. ESIS. Jakarta. 2007	√	
4.	Ekonomi untuk SMA dan MA. Kelas X Losina Purnastuti, Grasindo, Jakarta. 2007		√
5.	Ekonomi untuk Kelas X. Dra. Hj. Sukwiyati, dkk. Jakarta. Yudistira. Jakarta. 2007	√	
6.	Ekonomi untuk Kelas X. Ritonga, Phiebeta. Jakarta: 2007	√	

## 27. Mata pelajaran Sosiologi kelas X

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Sosiologi untuk Kelas X, Indianto M. Jakarta. 2004. Erlangga	√	
2.	Kompetensi Dasar Sosiologi untuk SMA/MA. Drs. Suseno. Surabaya: Tiga Serangkai. 2004		√
3.	Sosiologi 1. Kun Maryati dan Juju Suryawati. Jakarta: ESIS. 2001	√	

## 28. Mata pelajaran Seni Rupa kelas X

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Seni Rupa dan Desain untuk SMA Kelas X. Agus Sachari. Erlangga. Bandung. 2007	√	
2.	Seni Budaya untuk SMA Kelas X. Yayat Nusantara. Erlangga. 2007		√
3.	Kreasi Seni Budaya untuk SMA. Ganes. Kudus. 2007		√

## 29. Mata pelajaran Seni Tari kelas X

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Buku Seni Tari SMA		√

## 30. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan kelas X

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Muhajir. Pend. Jasmani dan Olahraga Kelas X. Erlangga. 2006. Bandung	√	
2.	Mukholid. Pend. Jasmani Kelas X. Yudistira. 2004		√

## 31. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan kelas XI

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Muhajir. Pend. Jasmani dan Olahraga Kelas XI. Erlangga. 2006. Bandung	√	
2.	Mukholid. Pend. Jasmani Kelas XI. Yudistira. 2004		√

## 32. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan kelas XII.

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Muhajir. Pend. Jasmani dan Olahraga Kelas XII. Erlangga. 2006. Bandung	√	
2.	Mukholid. Pend. Jasmani Kelas XII. Yudistira. 2004		√

## 33. Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas X

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Hariato K. Konsep Perncangan Data Base. Andi Ofsset. 2004. Yogyakarta		√
2.	Budi Sutejo D. Perancangan dan Pembangunan Sistem Informasi. Andi Offset. 2002. Yogyakarta		√
3.	Abdul Kadir. Pemograman Pascal. Andi Offset. 200. Yogyakarta	√	
4.	Antoni Pranata. 2001. Pemograman Borland Delphi. Edisi IV. Andi Offset. Yogyakarta	√	
5.	Frans Gunterus. Falsafah Dasar: Sistem Pengendali Proses. Elekmedia Komputindo. 2000		√

## 34. Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas XI

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	TI dan Komunikasi Kelas XI	√	
2.	Buku Kasus dan Penyelesaian MS. Exel		√
3.	Buku Microsoft Visual Basic 6.0. untuk Segala Tingkat . Elekmedia Komputindo	√	

## 35. Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas XII

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Buku Paket TI dan Komunikasi Kelas XII	√	
2.	Buku MS. Power Point XP. Andi Offset		√
3.	Buku Rahasia dan Trik Kreatif Macromedia Flash. Elekmedia Komputindo		√
4.	Buku 123 Tips dan Trik Action Scipt Macromedia Flash. Elekmedia Komputindo		√

## 36. Mata pelajaran Bahasa Jepang kelas X

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Daramawan, Rudy, dkk. Buku Pengantar Siswa Pelajaran BHS. Jepang I. 2007. Jakarta: PPPG Bahasa dan The Japan Foundation	√	
2.	Daramawan, Rudy, dkk. Skenario Pembelajaran Pelajaran Bahasa Jepang I. 2007. Jakarta: PPPG Bahasa dan The Japan Foundation	√	

## 37. Mata pelajaran Bahasa Arab kelas X

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Al-'arabiyah bin Namadziy Jz. 2. Lembaga Bahasa Syarif Hidayatullah. Bulan Bintang. 1996. Jakarta	√	
2.	Bahasa Arab 2. M. Zochdi Amin. PT. Al-Ma'arif. Bandung. 2003		√
3.	Petunjuk Percakapan Bahasa Arab- Inggris-Indonesia. Maftuh Ahnan. Bintang Usaha Jaya. 2005. Surabaya		√

## 38. Mata pelajaran Bahasa Mandarin kelas X

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Tan Tiong Hwat. Pelajaran Bahasa Mandarin Kelas 2 SMA. Puspa Swara	√	
2.	Practise Chinese. Taipe Language. Intitute Press		√
3.	D. Budiman. Kamus dan Ungkapan Umum, MBA 21.	√	
4.	Kasa kata Mandarin. Globalindo		√

## 39. Mata pelajaran Bahasa Mandarin kelas XI

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Tan Tiong Hwat. Pelajaran Bahasa Mandarin Kelas 2 SMA. Puspa Swara	√	
2.	Practise Chinese. Taipe Language. Intitute Press		√
3.	D. Budiman. Kamus dan Ungkapan Umum, MBA 21.	√	
4.	Kasa kata Mandarin. Globalindo		√
5.	Tan Tiong Hwat. Penuntun Menulis Hanzi. Puspa Swara		√

## 40. Mata pelajaran Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa kelas X

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Bekker S. J .J. W. M. 1988. Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar. Yogyakarta. Kanisiu.		√
2.	Yosodipura. Marmien Sardjono. 1996. Rias Pengantin Gaya dengan Segala Upacaranya. Yogyakarta: Kanisius		√
3.	Mintaraga. 2000. Jaka Thole. Panjebar Semangat		
4.	Subalidinata, RS. 1981. Seluk Beluk Kesusastraan Jawa. Yogyakarta: Keluarga Mahasiswa Satra Nusantara Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM		√
5.	Sawarna Y, dkk. 1998. Wewarah Basa Jawa. Gunung Kidul: SA. Dhaksinaga		√
6.	Wisnu Sri Widodo. 2000. Widaninggar, Widaningrum. Panjebar Semangat		√
7.	Danusupranata. 1985. Serat Walungreh. Surabaya: Citra Jaya.		√
8.	Gunawan Sri Hastyarja. 2000. Macapat 2. Surakarta: Cendrawasih		√
9.	Macapat. 2006. Djaka Lodang. 15. XXXVI. Yogyakarta: PT. Muria Baru Offset		√
10.	Sudaryanto. 2001. Kamus Pepak Bahasa Jawa. Yogyakarta: Bahasa dan Pekerja Konggres		√
11.	Amir Hazim MA. 1991. Nilai-nilai Etis dalam Wayang Purwa Mawa Carita. Surabaya: Pustaka Sinar Harapan		√
12.	Koentjaraningrat. 1984. Kebudayaan Jawa.		√

	Jakarta: Balai Pustaka		
13.	Mase Pam."Kunthi Pilih". Panjekar Semangat. 41. 2000. Surabaya: Pancaran Semangat Jaya.		√
14.	Padmosoekotjo. 1995. Silsilah Wayang Purwa Mawa Carita. Surabaya: Citra Jaya Murti		√
15.	Suyono, R. 2000. Wahyu Trisula Debya. Panjekar Semangat		√
16.	Anggara Kasih."Geguritan" Djaka Lodang. 15. XXXVI. Yogyakarta: PT. Muria Baru Offset		√
17.	Budiono Herusatolo. 1987. Simbolisme dalam Budaya Jawa. Yogyakarta: Hanindita.		√
18.	Rahmidi,"Geguritan" Sempulur, 19. 2007. Yayasan Budaya Kinanti		√
19.	Suwarna Pringgawi Dagda. 1988. Gita Wicara Jawi. Yogyakarta: Kanisius		√
20.	Yan Tohari. 2000. Taman Geguritan. Panjekar Semangat		√
21.	Hartono Kadarsono, "Kembang Tanjung". Panjekar Semangat 41. 2000. Surabaya: PT. Pancaran Semangat Jaya.		√
22.	Kridalaksana Harimurti. 1993. Kamus Linguistik. Jakarta: PTG		
23.	Rizamu Gani. 1980. Pengajaran Apresiasi Puisi dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra Tahun IV Nomor 3. Jakarta: Departemen P dan K		√
24.	Padmo Soekotjo,S. 1987. Wewaton Panulise Basa Jawa Nganggo Aksara Jawa. Surabaya: Citra Jaya Mukti		√
25.	Soerasa BA. Soetardjo W.R. 1981. Pathokan Panulise Tembung Jawa Nganggo Aksara Jawa dan Latin. Solo: Tiga Serangkai		√
26.	Suharti Prof. Dr. Dkk. Yogya Basa Jilid III. Yogyakarta: Dinas Pendidikan Prov. DIY	√	
27.	Wahyu Istiadi. 2000. Nlehuri Tulisan Jawa. Panjekar Semangat.		√

## 41. Mata pelajaran Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa kelas XI

No.	Daftar Sumber Belajar	Ketersediaan	
		Ada	Tidak ada
1.	Pringgawidagda, Suwarna. 1996. Gita Wicara Jawi: Pranata Cara Sastra Pamedhar Sabda. Yogyakarta: Kanisius.		√
2.	Purwadi. 2000. Pinter Sesorah Lan Pranata Cara. Yogyakarta: Grafika Indah		√
3.	S. Rekso. 2002. Panuntun Sekar Sumawur. Sukaharjo: Cendrawasih		√
4.	Mardiwarsito L. 1990. Kamus Jawa Kuno-Indonesia. Flores: Nusa Indah	√	
5.	Sri Widodo, S.Sn. 1996. Ketrampilan Karawitan. Surakarta: Cendrawasih		√
6.	Suharjendra. 2000. Taman Sari: Rantaman Kursus Macapat. Yogyakarta: Bebana		√
7.	Suseno, Frant. Magnis. 1988. Etika Jawa. Jakarta: Gramedia		√
8.	Atmaja Sutarja. 2004. Tuntutan Sesorah Saha Pranata Titi Laksana. Yogyakarta: Absolut	√	
9.	Sab/DL. 2007. Olahraga Air ing Pesisir Tanjung Benoa. Djka Lodanng. 34. XXXVI.		√
10.	Kridalaksana Harimurti. 1993. Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia		√
11.	Suharti dkk. 2005. Yogya Basa Jilid II. Yogyakarta: Lukman Offset	√	
12.	Yatman, Sudi dkk. 2005. Kabeh Seneng Basa Jawa Jilid 2. Semarang: Yudistira		√
13.	Subalidinata. 1994. Kawruh Kasustraan Jawa. Yogyakarta: Pustaka Nusantara		√
14.	Suparta Brata. 2005. Lelakone Silan Man. Yogyakarta: Narasi		√
15.	Esmiet. 2000. Sutradara. Panjebar Semangat		√
16.	Suparta Brata. Donyane Wong Culikan. 2004. Yogyakarta: Narasi		√
17.	Gunawan Sri Hastjarjo. 2000. Macapat. Sukarjo: Cendrawasih		√

B. Garis besar pedoman wawancara.

1. Sekolah Bertaraf Internasional

- a. Menurut anda, apa yang dimaksud dengan Sekolah Bertaraf Internasional?
- b. Menurut anda, bagaimanakah dengan kurikulum yang berlaku di dalam Sekolah Bertaraf Internasional?
- c. Menurut anda, apa tujuan dilaksanakannya Sekolah Bertaraf Internasional?

2. Pengembangan Koleksi

- a. Menurut anda, bagaimanakah kegiatan pengembangan koleksi yang dilaksanakan oleh perpustakaan?
- b. Menurut anda, bagaimanakah kegiatan evaluasi koleksi yang dilaksanakan oleh perpustakaan?
- c. Menurut anda, apa sebabnya ketersediaan koleksi sumber belajar mata pelajaran kelas internasional terjadi perbedaan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain?
- d. Menurut anda, bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan kebijakan kegiatan pengadaan koleksi khususnya koleksi sumber belajar yang digunakan kelas internasional?

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2007

TENTANG

PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
  - b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam;
  - d. bahwa ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan masih bersifat parsial dalam berbagai peraturan sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perpustakaan;

Mengingat: . . .

- 2 -

Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERPUSTAKAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
2. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
3. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Naskah . . .

4. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
5. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
6. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
7. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
8. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
9. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
10. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
11. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

12. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
13. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
16. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

#### Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

#### Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

#### Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

## BAB II

### HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
  - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
  - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
  - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
  - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban

#### Pasal 6

- (1) Masyarakat berkewajiban:
  - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
  - b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;
  - c. menjaga . . .

- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
  - d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
  - e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
  - f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah berkewajiban:
- a. mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional;
  - b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
  - c. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air;
  - d. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia);
  - e. menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan;
  - f. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan;
  - g. membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan;
  - h. mengembangkan Perpustakaan Nasional; dan
  - i. memberikan . . .

- i. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 8

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

#### Bagian Ketiga

#### Kewenangan

#### Pasal 9

Pemerintah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan nasional dalam pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. mengatur, . . .

- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

#### Pasal 10

Pemerintah daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

### BAB III

#### STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

#### Pasal 11

- (1) Standar nasional perpustakaan terdiri atas:
  - a. standar koleksi perpustakaan;
  - b. standar sarana dan prasarana;
  - c. standar pelayanan perpustakaan;
  - d. standar tenaga perpustakaan;
  - e. standar penyelenggaraan; dan
  - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### BAB IV

#### KOLEKSI PERPUSTAKAAN

##### Pasal 12

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (3) Bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi khusus Perpustakaan Nasional.
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan secara terbatas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penggunaan secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

##### Pasal 13

- (1) Koleksi nasional diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk nasional (KIN), dan didistribusikan oleh Perpustakaan Nasional.
- (2) Koleksi nasional yang berada di daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah (KID), dan didistribusikan oleh perpustakaan umum provinsi.

BAB V  
LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 14

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antarperpustakaan.
- (7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

BAB VI  
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, SERTA PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu  
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan . . .

- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. memiliki koleksi perpustakaan;
  - b. memiliki tenaga perpustakaan;
  - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
  - d. memiliki sumber pendanaan; dan
  - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.

## Bagian Kedua

### Penyelenggaraan Perpustakaan

#### Pasal 16

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. perpustakaan pemerintah;
- b. perpustakaan provinsi;
- c. perpustakaan kabupaten/kota;
- d. perpustakaan kecamatan;
- e. perpustakaan desa;
- f. perpustakaan masyarakat;
- g. perpustakaan keluarga; dan
- h. perpustakaan pribadi.

#### Pasal 17

Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Bagian Ketiga . . .

### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

##### Pasal 18

Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

##### Pasal 19

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

## BAB VII

### JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

##### Pasal 20

Perpustakaan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Nasional;
- b. Perpustakaan Umum;
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- d. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- e. Perpustakaan Khusus.

## Bagian Kesatu

### Perpustakaan Nasional

#### Pasal 21

- (1) Perpustakaan Nasional merupakan LPND yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan berkedudukan di ibukota negara.
- (2) Perpustakaan Nasional bertugas:
  - a. menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan;
  - b. melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan;
  - c. membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan
  - d. mengembangkan standar nasional perpustakaan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpustakaan Nasional bertanggung jawab:
  - a. mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
  - b. mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa;
  - c. melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat; dan
  - d. mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri.

Bagian Kedua  
Perpustakaan Umum

Pasal 22

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau kabupaten/kota melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Bagian Ketiga  
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 23

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Perpustakaan . . .

- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

#### Bagian Keempat

#### Perpustakaan Perguruan Tinggi

#### Pasal 24

- (1) Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

(4) Setiap . . .

- (4) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

## Bagian Kelima Perpustakaan Khusus

### Pasal 25

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

### Pasal 26

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

### Pasal 27

Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

### Pasal 28

Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus.

BAB VIII  
TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN, DAN  
ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu  
Tenaga Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus nonpegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 30

Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum Pemerintah, perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

Pasal 31 . . .

### Pasal 31

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

### Pasal 32

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

## Bagian Kedua

### Pendidikan

#### Pasal 33

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum provinsi, dan/atau perpustakaan umum kabupaten/kota dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga  
Organisasi Profesi

Pasal 34

- (1) Pustakawan membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 35

Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan;
- c. memberi perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
- d. menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 36

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.

Pasal 37 . . .

Pasal 37

- (1) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 38

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pasal 40 . . .

Pasal 40

- (1) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan perpustakaan bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. sebagian anggaran pendidikan;
  - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
  - d. kerja sama yang saling menguntungkan;
  - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
  - f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
  - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

BAB XI

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 42

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.

(3) Kerja . . .

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

## Bagian Kedua

### Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 43

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

## BAB XII

### DEWAN PERPUSTAKAAN

#### Pasal 44

- (1) Presiden menetapkan Dewan Perpustakaan Nasional atas usul Menteri dengan memperhatikan masukan dari Kepala Perpustakaan Nasional.
- (2) Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsi atas usul kepala perpustakaan provinsi.
- (3) Dewan Perpustakaan Nasional bertanggung jawab kepada Presiden dan Dewan Perpustakaan Provinsi bertanggung jawab kepada gubernur.
- (4) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:
  - a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
  - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
  - c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
  - d. 2 (dua) orang akademisi;
  - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;

f. 1 (satu) . . .

- f. 1 (satu) orang sastrawan;
  - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
  - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
  - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
  - j. 1 (satu) orang tokoh pers.
- (5) Dewan perpustakaan dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota dewan perpustakaan.
- (6) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:
- a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan;
  - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan
  - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.

#### Pasal 45

- (1) Dewan Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan tugas dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Dewan Perpustakaan Provinsi dalam melaksanakan tugas dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 46

Dewan perpustakaan dapat menjalin kerja sama dengan perpustakaan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6).

Pasal 47 . . .

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan anggota, serta pemilihan pimpinan dewan perpustakaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 48

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 49

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 50 . . .

#### Pasal 50

Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

#### Pasal 51

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca.
- (2) Gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XIV

### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 52

- (1) Semua lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 53

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini.

#### Pasal 54

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 27 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Nopember 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Nopember 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Hal itu karena ketika manusia purba mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan mereka untuk diingat dan disampaikan kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan/atau apa yang dirasakan serta menggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untuk mengomunikasikannya kepada orang lain. Waktu itulah eksistensi dan fungsi perpustakaan mulai disemai. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh-kembangnya perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks. Dari sini awal mulai berkembang ilmu dan teknik mengelola perpustakaan.

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.

Di sisi lain, perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu, perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana

dituangkan dalam Deklarasi *World Summit of Information Society-WSIS*, 12 Desember 2003.

Deklarasi WSIS bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif, berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan. Setiap orang dapat mencipta, mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi serta pengetahuan hingga memungkinkan setiap individu, komunitas, dan masyarakat luas menggunakan seluruh potensi mereka untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidup.

Indonesia telah merdeka lebih dari 60 (enam puluh) tahun, tetapi perpustakaan ternyata belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa perlu dikembangkan suatu sistem nasional perpustakaan. Sistem itu merupakan wujud kerja sama dan perpaduan dari berbagai jenis perpustakaan di Indonesia demi memungkinkan institusi perpustakaan menjalankan fungsi utamanya menjadi wahana pembelajaran masyarakat dan demi mempercepat tercapainya tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan ketidakjelasan kewenangan pusat dan daerah dalam bidang perpustakaan. Keberadaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai LPND berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tidak lagi memiliki kekuatan efektif dalam melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman kebijakan dalam pengembangan perpustakaan di daerah secara umum pada satu sisi menguntungkan sebagai pendelegasian kewenangan kepada daerah. Namun, di sisi lain dianggap kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan perpustakaan yang andal dan profesional sesuai dengan standar ilmu perpustakaan dan informasi yang baku karena bervariasinya kemampuan manajemen dan finansial yang dimiliki oleh setiap daerah serta adanya perbedaan pemahaman dan persepsi mengenai peran dan fungsi perpustakaan.

Sejumlah warga masyarakat telah mengupayakan sendiri pendirian taman bacaan atau perpustakaan demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah. Namun, upaya sebagian kecil masyarakat ini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlah, variasi, dan intensitasnya jauh lebih besar. Untuk itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana yang paling demokratis untuk belajar sepanjang hayat demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan . . .  
Dengan adanya undang-undang ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Indonesia sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Indonesia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi atau terbelakang akibat faktor geografis berhak mendapatkan layanan perpustakaan sesuai dengan kondisi setempat misalnya, perpustakaan keliling atau perpustakaan terapung.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Sebagian besar naskah kuno masih dimiliki masyarakat. Untuk memudahkan pendataan dan upaya pelestariannya, perlu didaftarkan ke Perpustakaan Nasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem nasional perpustakaan adalah sistem pensinergian semua jenis perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI guna lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan

bangsa. Sistem nasional perpustakaan mempunyai keterkaitan secara fungsional dengan sistem pendidikan nasional khususnya pada prinsip pendidikan nasional yang diselenggarakan sebagai pembudayaan dan pemberdayaan termasuk di dalamnya pembelajaran sepanjang hayat. Bahwa sistem nasional perpustakaan dan sistem pendidikan nasional secara bersama-sama berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas sebagai bagian yang inheren dari pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud transmedia adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain, seperti mikrofilm, CD, digital.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Naskah kuno berisi warisan budaya karya intelektual bangsa Indonesia yang sangat berharga dan hingga saat

ini masih tersebar di masyarakat dan untuk melestarikannya perlu peran serta pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan standar tenaga perpustakaan juga mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Yang dimaksud bahan perpustakaan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 adalah barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai buletin, surat kabar harian, majalah dan penerbitan berkala. Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan keilmuan, bahan perpustakaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi khusus Perpustakaan Nasional untuk didayagunakan secara terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Penerbitan katalog induk nasional dilakukan baik secara tercetak (*hardcopy*) maupun secara terdigitalisasi (*softcopy*).

Ayat (2)

Penerbitan katalog induk daerah dilakukan baik secara tercetak (*hardcopy*) maupun secara terdigitalisasi (*softcopy*).

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dengan memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional, suatu perpustakaan secara formal dimasukkan dalam sistem nasional perpustakaan untuk secara bersinergi dan terkoordinasi dengan perpustakaan lainnya mendukung pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat setempat seperti nagari, bori, naga, dan sejenisnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan dimaksudkan guna mewujudkan suatu sistem nasional perpustakaan yang efektif dan efisien agar secara sinergis mendukung pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam mengembangkan standar nasional perpustakaan, Perpustakaan Nasional bekerja sama dan berkoordinasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Koleksi nasional perlu dikembangkan karena memuat simpanan informasi yang luas dan permanen sebagai hasil karya budaya bangsa yang harus dilestarikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang dalam pengembangan koleksinya wajib menyimpan bahan perpustakaan berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam yang diterbitkan di daerah tersebut, atau karya tentang daerah tersebut yang ditulis oleh warga negara Indonesia dan diterbitkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jumlah judul dalam koleksi perpustakaan perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan untuk bacaan wajib, bacaan penunjang, dan bacaan pengayaan wawasan keilmuan yang terkait dengan mata kuliah yang disajikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang tentang Kepegawaian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud tenaga ahli di bidang perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang perpustakaan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memajukan profesi meliputi peningkatan kompetensi, karier, dan wawasan kepelestarian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan adalah prinsip pengalokasian anggaran yang memungkinkan seluruh fungsi perpustakaan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, lancar, meningkat, dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sebagian anggaran pendidikan adalah anggaran yang dialokasikan untuk fungsi pendidikan, yang besarnya didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Dewan Perpustakaan.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan, Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi dapat bekerja sama dengan lembaga independen yang kompeten.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat, meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas, dan penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum (kantor, ruang tunggu, terminal, bandara, rumah sakit, pasar, mall).

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50 . . .

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Satuan pendidikan merupakan wahana paling tepat untuk menumbuhkan kegemaran membaca sejak usia dini yang terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan kemampuan peserta didik, antara lain, melalui penugasan kepada mereka untuk mendayagunakan bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.